



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

---

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke	: 30
Jenis Rapat	: RDP Panja Verifikasi dan Validasi data Kemiskinan
Dengan	: Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan RB RI, Dirjen Bina Marga Keuangan Daerah Kemendagri RI, dan Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa KDPDTT RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Rabu, 5 Februari 2020.
Waktu	: Pukul 13.00 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: Penguatan Kelembagaan Pusdatin Kesos Kemensos dan dukungan anggaran.
Ketua Rapat	: <b>H.M.R. Ihsan Yunus, BA,B.Comm,ME.Con.</b>
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 19 dari 26 Anggota Panja Verivali Komisi VIII DPR RI. 2. 5 Orang Anggota Panja Verivali Komisi VIII DPR RI Izin. 3. Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan RB RI, Dirjen Bina Marga Keuangan Daerah Kemendagri RI, dan Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa KDPDTT RI.

**I. PENDAHULUAN:**

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 14.50 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, H.M.R. Ihsan Yunus, BA,B.Comm,ME.Con dengan didampingi Ketua Komisi VIII DPR RI, H.Yandri Susanto, S.Pt, dan Wakil Ketua DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si, sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

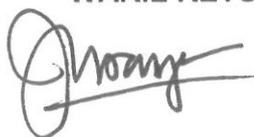
Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI mengenai Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan dengan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, dengan agenda “**Penguatan Kelembagaan Pusdatin Kesos dan Dukungan Anggaran**”, dapat dicatat beberapa hal sebagai berikut:

1. Panja Komisi VIII DPR RI meminta agar Pemerintah terutama Kementerian terkait melakukan sinergitas dalam hal pemutakhiran data kemiskinan dalam rangka mewujudkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang akan dijadikan data rujukan nasional.
2. Panja Komisi VIII DPR RI meminta Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah untuk memasukan kegiatan pemutakhiran data kemiskinan ke dalam Pedoman Penyusunan APBD Setiap Tahun Anggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
3. Panja Komisi VIII DPR RI meminta Kemendes mensinergikan program pemutakhiran data kemiskinan sebagaimana tercantum dalam Permendes No 11 Tahun 2019 Pasal 6 Ayat (3) Poin b. dengan program pemutakhiran data pada Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos RI.
4. Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI akan memfasilitasi upaya pemutakhiran data bagi Kabupaten/Kota yang belum memutakhirkan data kemiskinan.

## III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.35 WIB.

**PIMPINAN PANJA KOMISI VIII DPR RI  
PANJA VERIVIKASI DAN VALIDASI DATA KEMISKINAN,  
WAKIL KETUA,**



**H.M.R. IHSAN YUNUS, BA,B.Comm,ME.Con**